



LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD PROVINSI BANTEN

TRIWULAN I

TAHUN ANGGARAN 2023

**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kehadiran Allah SWT, berkat karunia serta ridho-Nya Laporan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Banten Triwulan I Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan. Laporan ini dimaksudkan untuk menyediakan informasi mengenai pencapaian atas kinerja sasaran, program kegiatan yang telah ada dalam dokumen RKPD Tahun 2023 Provinsi Banten beserta kendala/permasalahan serta rencana tindak lanjut dalam penyelesaiannya.

Dalam rangka penjabaran pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan melaksanakan pengendalian dan evaluasi Pembangunan Tahunan didaerah yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Pasal 245 dimana menjelaskan bahwa Kepala Bappeda Provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD provinsi.

Laporan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Provinsi Banten Triwulan I Tahun Anggaran 2023 diharapkan dapat membantu dalam upaya pencapaian target yang telah ditetapkan serta bermanfaat bagi pihak terkait dalam melaksanakan pembangunan daerah di Wilayah Provinsi Banten.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Serang, Mei 2023

KEPALA,

Ttd.

Dr. MAHDANI, SE, ST, M.Si, MM
NIP. 19690219 200112 1 001

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
EXECUTIVE SUMMARY.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	I - 1
1.1. Latar Belakang.....	I - 1
1.2. Ruang Lingkup.....	I - 2
1.3. Dasar Hukum	I - 3
1.4. Tujuan	I - 4
1.5. Metode Evaluasi RKPD	I - 5
1.6. Sistematika Penulisan	I - 7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI BANTEN TAHUN 2023	II - 1
2.1. Keselarasan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2023	II - 1
2.2. Keselarasan Rencana Tujuan, Sasaran Daerah dan Program Prioritas	II - 2
2.3. Relevansi Program RPD Dengan RKPD	II - 6
2.4. Relevansi Program RKPD Dengan APBD	II - 7
BAB III EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI BANTEN TAHUN 2023	III - 1
3.1. Capaian Kinerja Indikator Makro.....	III - 1
3.2. Capaian Kinerja Utama Daerah Tahun 2023	III - 11
3.3. Rekapitulasi Capaian Kinerja Urusan Triwulan I Tahun 2023 ...	III - 13
3.4. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	III - 17
3.5. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	III - 19
3.6. Penyelenggaraan Urusan Pilihan	III - 22
3.7. Penyelenggaraan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan.....	III - 24
3.8. Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	III - 24
3.9. Penyelenggaraan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan ...	III - 26
3.10. Penyelenggaraan Unsur Pemerintahan Umum	III - 26
3.11. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Berdasarkan Program Tahun 2023	III - 26
BAB IV ANALISIS, PERMASALAHAN DAN SOLUSI.....	IV - 1
4.1. Analisis Kinerja Perangkat Daerah Berdasarkan laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah.....	IV - 1
4.2. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan	IV - 1
BAB V PENUTUP.....	V - 1

RINGKASAN

Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD di Provinsi Banten Triwulan I Tahun Anggaran 2022 dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD provinsi dapat dicapai, untuk mewujudkan visi RPJMD dan mencapai sasaran pembangunan tahunan nasional. Belanja Daerah pada APBD TA 2023 sebesar Rp. 11.774.651.290.753 dan terealisasi sebesar Rp 1.199.005.915.125 atau 10,18%.

Pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Tahun 2023-2026 sebanyak 33 Indikator, dimana yang telah tercapai sebanyak 17 indikator dan sebanyak 16 indikator berprogress mencapai target kinerja 2023. Hal lainnya pada capaian Kinerja Urusan atau Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2023 sebanyak 92 indikator yang tersebar kinerjanya di 34 Perangkat Daerah, dari 92 indikator tersebut terdapat 13 indikator yang telah tercapai targetnya di 2023, sebanyak 26 indikator yang dalam progress pencapaian, dan 53 indikator baru akan terhitung di triwulan berikutnya.

Pelaksanaan RKPD pada Triwulan I TA 2023 secara umum belum dijumpai adanya kendala yang berarti. Sebagian besar anggaran Program Kegiatan belum dapat direalisasikan karena memang masih dalam fase persiapan pelaksanaan kegiatan.

Demikian Laporan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2021 disusun, diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai *feed back* dalam pelaksanaan program pembangunan periode selanjutnya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya berkaitan dengan pengaturan teknis, telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD provinsi, yang mencakup sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas Daerah. Evaluasi sebagaimana dimaksud dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD provinsi, dan digunakan untuk mengetahui:

1. Realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD provinsi, dengan capaian indikator kinerja program, lokasi, dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD provinsi; dan
2. Realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD provinsi dengan laporan realisasi APBD provinsi.

Evaluasi sebagaimana dimaksud dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD provinsi dapat dicapai, untuk mewujudkan visi RPJMD dan mencapai sasaran pembangunan tahunan nasional.

Bappeda melaksanakan evaluasi berupa pemantauan dan supervisi setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah provinsi. Hasil evaluasi dimaksud digunakan sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan RKPD provinsi tahun berikutnya. Kemudian Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi kebijakan rencana dan pelaksanaan rencana pembangunan kepada Gubernur, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

1.2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pengendalian dan Evaluasi perencanaan pembangunan daerah meliputi:

1. Pengendalian dan evaluasi kebijakan dengan tujuan untuk menjamin bahwa kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang disusun telah melalui tahapan sesuai ketentuan dan mengacu kepada peraturan yang lebih tinggi, sehingga dokumen perencanaan merupakan satu kesatuan sistem rencana pembangunan yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya;
2. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dengan tujuan untuk menjamin bahwa perencanaan pembangunan yang disusun telah menindaklanjuti atau merupakan turunan dari perencanaan pembangunan yang mempunyai lingkup lebih luas dan waktu yang lebih lama;
3. Evaluasi hasil untuk memastikan dan mengetahui secara objektif kesesuaian antara hasil capaian rencana pembangunan daerah

dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan dan kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaan rencana pembangunan dimaksud.

1.3. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 – 2025 ;
11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026;
12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2023;
14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023;
15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.4. TUJUAN

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan konsistensi antara RKPD dengan RPJMD/RPD dan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah

dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan serta dapat menjamin bahwa:

1. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam penyusunan RKPD Provinsi sesuai dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD/RPD Provinsi;
2. Rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD Provinsi, sesuai dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD/RPD Provinsi;
3. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam menyusun RKPD Provinsi, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah Provinsi, serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional; dan
4. Sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan RKPD Provinsi

1.5. METODE EVALUASI RKPD

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD provinsi, dalam hal berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD provinsi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala BAPPEDA provinsi melakukan perbaikan/penyempurnaan, dan Kepala BAPPEDA provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD provinsi kepada Gubernur, kemudian Gubernur menyampaikan laporan ke Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas.

Pelaksanaan Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah lingkup Provinsi, meliputi:

1. Kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
2. Pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

3. Hasil rencana pembangunan daerah.

Pada kegiatan pengendalian evaluasi yang didokumentasikan dalam buku ini adalah evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD Provinsi Banten Triwulan I Tahun 2023. Adapun metode evaluasi RKPD Provinsi Banten menggunakan:

- a. Pendekatan *gap analysis* (analisis kesenjangan) yang membandingkan antara realisasi hasil kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dan membandingkan antara realisasi anggaran dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD;
- b. Evaluasi Indikator kinerja kegiatan/program pembangunan daerah dilakukan dengan menghitung persentase antara capaian kinerja per triwulan dengan target kinerja dalam RKPD/Renja SKPD (hingga Triwulan I). Kinerja anggaran diukur dengan menghitung persentase antara target yang ditetapkan dalam APBD dengan realisasi keuangan per triwulan.

Tahapan evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Persiapan

Bappeda Provinsi Banten menghimpun dokumen hasil realisasi kinerja seluruh Perangkat Daerah, sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Renstra dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Banten;
- b. Hasil realisasi kinerja dan anggaran pada Triwulan I Tahun 2023.

2. Pelaksanaan

Bappeda Provinsi Banten melakukan evaluasi hasil Pelaksanaan RKPD Triwulan I Tahun 2023 melalui input realisasi kinerja dan keuangan dari seluruh Perangkat Daerah, berdasarkan input tersebut seluruh Pendamping Perangkat Daerah melakukan verifikasi, analisis dokumen dan menelaah keterkaitan antar dokumen hasil realisasi kinerja Triwulan, dalam hal ditemukan

adanya ketidaksesuaian antara hasil dengan rencana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tentang Renstra dan Renja Perangkat Daerah kemudian dicatat untuk dilakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

3. Pelaporan

Kepala Bappeda menyampaikan laporan hasil evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD Triwulan I Tahun 2023 berdasarkan hasil akhir verifikasi Pendamping dari seluruh Perangkat Daerah.

1.6. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Provinsi Banten Triwulan I tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI BANTEN TAHUN 2023

BAB III : EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI BANTEN TAHUN 2023

BAB IV : ANALISIS, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

BAB V : PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI BANTEN
TAHUN 2023

Mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Evaluasi pelaksanaan RKPD dilakukan terhadap Kebijakan umum dan Program pembangunan dan Indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun 2023. Pada tahun pengendalian 2023 ini dilaksanakan dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 yang merupakan pengganti RPJMD 2017-2022 yang telah berakhir perodesasinya.

2.1. Keselarasan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2023

Hasil dari pengendalian dan evaluasi RKPD tahun 2023 terhadap RPD 2023-2026 seperti pada tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1 Keselarasan Pelaksanaan RKPD Tahun 2023

RKPD dan Kumpulan Renja Perangkat Daerah	APBD dan Laporan Triwulan	Kesesuaian		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)
Keselarasan Kebijakan umum dan Program pembangunan tahun 2023						
Prioritas dan Sasaran Pembangunan	KUA	√	-	-	-	-

RKPD dan Kumpulan Renja Perangkat Daerah (1)	APBD dan Laporan Triwulan (2)	Kesesuaian		Evaluasi (4)	Tindak Lanjut (5)	Hasil Tindak Lanjut (6)
		Ya (3a)	Tidak (3b)			
Rencana program dan kegiatan prioritas, dan pagu indikatif	PPAS	√	-	-	-	-
Keselarasan rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun 2023						
Program dan kegiatan seluruh Renja Perangkat Daerah	RKA Perangkat Daerah	√	-	-	-	-
Realisasi Capaian Kinerja						
Realisasi Pencapaian Target	Triwulanan					
Penyerapan Dana	Triwulanan					
Kendala Pelaksanaan	Triwulanan					

2.2. Keselarasan Rencana Tujuan, Sasaran Daerah dan Program Prioritas Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Banten tahun 2023-2026 yang terdapat dalam dikumen RPD, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan. Strategi tersebut disusun dalam rangka pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah. Arah kebijakan pembangunan tahun 2023 dan program pembangunan tahun 2023 harus berorientasi pada pencapaian sasaran pembangunan yang dituju, visi misi yang digunakan pada RPD mengacu pada dokumen

RPJPD 2005-2025 yang diselaraskan dengan mendukung tujuan dan sasaran RPD dengan efektif dan efisien. Target pembangunan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 seperti pada tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2.
Sasaran dan Target Pembangunan Daerah Tahun 2023

VISI: “BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”								
No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2021 (Awal)	Target Tahun 2023	2026 (Akhir)
1	Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Tingkat Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas Keluarga Sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga (satuan: nilai)	52,83	58,13	71,06
				Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Perbatasan	Indeks Desa Membangun (satuan: nilai)	0,644	0,665	0,695
				Meningkatnya Pelayanan Sosial	Proporsi penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan sosial (satuan: persen)	7,71	7,74	7,79
			Tingkat Pengangguran Terbuka 8,98% (2021) menjadi 8,20% (2026)	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (satuan: persen)	64,48	65,19	66,24
			Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (satuan: nilai)	Meningkatnya Pemerataan Akses	Rata-rata Lama Sekolah (satuan: tahun)	8,93	9,11	9,40
				dan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah (satuan: tahun)	13,02	13,75	14,30
				Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (satuan: tahun)	70,02	70,40	70,83
					Prevalensi Stunting pada Balita (satuan: persen)	24,50	23,50	22,00
				Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan berbasis gender	Indeks Pembangunan Gender (satuan: nilai)	91,67	93,07	93,91
				Terbentuknya Karakter dan Jati Diri Masyarakat yang Berakhlak Mulia dan Berbudaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan (satuan: nilai)	52,63	55,03	58,63

VISI: “BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”								
No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2021 (Awal)	Target Tahun 2023	2026 (Akhir)
					Indeks Pembangunan Pemuda dan Olahraga (satuan: nilai)	48,67	49,42	51,67
2	Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan	Terwujudnya Pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi 4,44% (2021) menjadi 5,27 - 5,41 (2026)	Meningkatnya Iklim Investasi dan Usaha	Pertumbuhan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB (satuan : persen)	3,87	3,97	6,82
				Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan	LPE sektor industri (Satuan: persen)	4,93	4,99	5,69
					LPE Sektor Perdagangan (satuan: persen)	1,84	2,44	4,24
				Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	LPE Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (satuan: persen)	4,30	4,39	4,66
				Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dan Kelautan	LPE Sektor Pertanian dan Kelautan (satuan: persen)	0,56	0,68	1,04
			Indeks Williamson 0,625 (2021) menjadi 0,618 (2026)	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis	Indeks Daya Saing Infrastruktur (satuan: level)	Tinggi	tinggi	Sangat tinggi
			Indeks Gini 0,363 (2021) menjadi 0,336 (2026)	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita Tahunan yang Disesuaikan (Satuan: Ribu Rupiah)	12.033	12,168	12.573
3	Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari	Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 14,48% (2021) menjadi 20% (2026)	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (satuan: nilai)	62,94	62,99	63,14
				Meningkatnya Mitigasi, Kesiapsiagaan, dan Tanggap Darurat Bencana	Indeks Risiko Bencana (satuan: nilai)	149,08	147,37	140,02
4	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Indeks Reformasi Birokrasi 61 (2021) menjadi 81 (2026)	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi (satuan: nilai)	65,88	69,77	80,00
					Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (satuan: nilai)	55,89	82,20	87,60

VISI: “BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”								
No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2021 (Awal)	Target Tahun 2023	2026 (Akhir)
					Indeks Persepsi Anti-Korupsi (satuan: nilai)	2	2-3	2-3
					Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (satuan: nilai)	3,45	3,47	3,53
				Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Nasional di Provinsi Banten	Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Banten (satuan: level)	Cukup Tangguh	Cukup Tangguh	Tangguh

Guna mendukung pencapaian tujuan, sasaran dan target pembangunan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2022, ditetapkan pagu indikatif program sesuai dengan prioritas, seperti pada tabel 2.3 dibawah ini:

Tabel 2.3 Jumlah Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7	22
2	Dinas Kesehatan	5	16
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11	24
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	8	19
5	Satuan Polisi Pamong Praja	3	12
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	12
7	Dinas Sosial	6	18
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6	20
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	14	36
10	Dinas Ketahanan Pangan	5	13
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	15	29
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	12
13	Dinas Perhubungan	4	16
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	5	13
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6	14
16	Dinas Penanaman Modal	6	14

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN
	dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4	14
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4	14
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	6	28
20	Dinas Pariwisata	5	17
21	Dinas Pertanian	7	23
22	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	5	17
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10	22
24	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	3	11
25	Biro Hukum	2	7
26	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	2	7
27	Biro Umum dan Perlengkapan	1	10
28	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	2	8
29	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	3	9
30	Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol	1	7
31	Sekretariat DPRD	2	17
32	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	4	19
33	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3	15
34	Badan Pendapatan Daerah	2	9
35	Badan Kepegawaian Daerah	2	12
36	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	10
37	Badan Penghubung	2	7
38	Inspektorat	3	12
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	12
JUMLAH		309	938

2.3. Relevansi Program RPD Dengan RKPD

Dalam RPD Provinsi Banten tahun 2023-2026 direncanakan terdapat 176 Program, dan dalam RKPD Provinsi Banten tahun 2023 direncanakan sebanyak 309 program dan 938 Kegiatan yang tersebar ke seluruh Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RKPD. Hal tersebut dikarenakan adanya penyesuaian nomenklatur program yang mengacu pada Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Apabila merujuk pada hasil pemetaan terhadap program RPD dan Program nomenklatur, secara keseluruhan mengindikasikan bahwa seluruh program yang ada di dalam RPD dilaksanakan oleh OPD sesuai dengan urusannya masing-masing.

2.4. Relevansi Program RKPD Dengan APBD

Dalam RKPD Provinsi Banten tahun 2023 direncanakan sebanyak 309 program yang direncanakan dalam APBD. Program-program yang terdapat dalam RKPD yaitu berjumlah 309 program seluruhnya dianggarkan dalam APBD, hal tersebut mengindikasikan bahwa seluruh program dalam RKPD menjadi prioritas dalam pembangunan, meskipun arah dan kebijakan pembangunan daerah tahun 2023 Provinsi Banten bersifat tematik.

Terkait dengan anggaran APBD 2023 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp 12.163.149.023.771, hal tersebut menyesuaikan dengan asumsi struktur anggaran.

BAB III
EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) PROVINSI BANTEN TAHUN 2023

3.1. Capaian Kinerja Indikator Makro

Penyelenggaraan pemerintahan Pemerintah Daerah Provinsi Banten dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur sebagai parameter keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah digunakan indikator makro pembangunan yang terdiri dari indeks pembangunan manusia, laju pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, indeks gini, dan tingkat inflasi. Indikator tersebut merupakan indikator yang bersifat dampak (*impact*) dari pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat lokal, regional, dan nasional. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta pelaku pembangunan lainnya. Capaian indikator makro Provinsi Banten pada Tahun 2023 disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Indikator Makro Provinsi Banten Tahun 2023

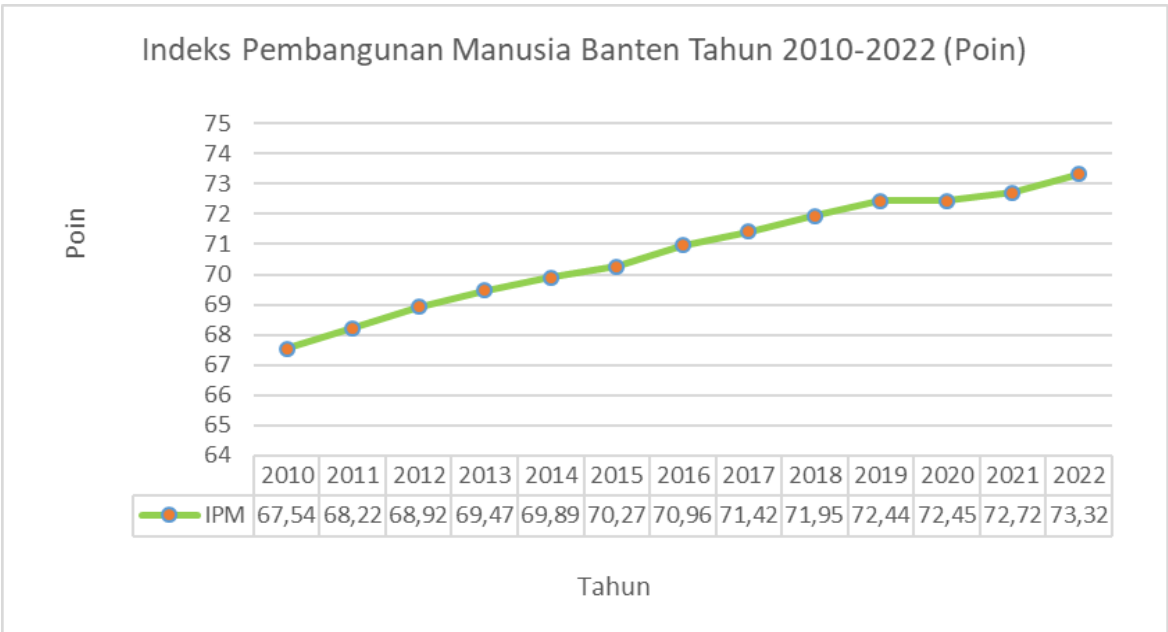
No	Indikator	Satuan	Realisasi 2022	Target RKPD 2023	Realisasi Triwulan I	Keterangan
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	73,32	73,27	73,32	Realisasi Tahun 2022
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,03	5,02-5,15	4,68	Realisasi Tw 1 2023
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	8,09	8,67	7,97	Realisasi Februari 2023
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,24	5,58	6,24	Realisasi Tahun 2022
5	Indeks Gini	poin	0,377	0,354	0,377	Realisasi Tahun 2022

Sumber: RKPD 2023, BPS Provinsi Banten

3.1.1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Umur panjang dan hidup sehat ini digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), pengetahuan diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, sedangkan standar hidup layak digambarkan oleh Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PKP), yang nilainya ditentukan dari pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

Gambar 3.1
Perkembangan IPM Provinsi Banten Tahun 2010-2022



Sumber: BPS Provinsi Banten, 2022

Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten terepresentasikan melalui capaian IPM Banten Tahun 2022. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, capaian Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten Tahun 2022 sebesar 73,32 poin dan mencapai angka target yang ditetapkan yakni pada angka 72,60-73,60

poin sebagaimana tercantum dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2022.

Ketercapaian IPM Provinsi Banten di tahun 2022 termasuk pada klasifikasi “tinggi” dan menunjukkan peningkatan sebesar 0,6 poin jika dibandingkan tahun sebelumnya. Secara nasional IPM Provinsi Banten lebih baik dari IPM nasional yaitu 72,91poin, dimana Banten menempati peringkat ke-8 dengan status IPM tertinggi. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa penduduk Banten dapat lebih meningkatkan akses terhadap hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.

Peningkatan IPM Banten terjadi pada semua komponen pembentuk. Umur Harapan Hidup Banten pada tahun 2022 mencapai 70,39 tahun. Dengan demikian, setiap penduduk Banten yang lahir pada tahun 2022 mempunyai harapan untuk hidup sampai usia 70 tahun. Sepanjang periode 2010 hingga 2022, Banten telah berhasil meningkatkan Umur Harapan Hidup saat lahir selama 1,89 tahun.

Adapun Harapan Lama Sekolah pada tahun 2022 telah mencapai 13,05 tahun. Artinya, bahwa anak-anak yang telah berusia 7 tahun pada tahun 2022, memiliki peluang untuk bersekolah hingga Semester II diperguruan tinggi, atau setidaknya menamatkan pendidikan hingga lulus SLTA.

Rata-rata Lama Sekolah di Banten pada tahun 2022 telah mencapai 9,13 tahun dengan pertumbuhan yang selalu positif. Artinya, secara rata-rata penduduk yang berusia 25 tahun ke atas pada tahun 2022 telah mengenyam pendidikan hingga kelas IX (SMP kelas III), Selain itu, angka pertumbuhan Rata-rata Lama Sekolah yang selalu positif, menjadi penanda bahwa kualitas pendidikan penduduk Banten terus mengalami peningkatan. Bahkan, dalam periode setahun terakhir ini, peningkatan kualitas pendidikannya lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya.

Pencapaian IPM dengan kriteria tinggi ini didukung oleh berbagai faktor antara lain; 1) Penyediaan alokasi anggaran pendidikan yang mencapai Rp.3,10 triliun atau 25,92% dari belanja daerah (ketentuan minimal 20%); 2) Penyediaan alokasi belanja kesehatan yang mencapai Rp1,35 triliun atau 13,64% dari belanja

daerah (ketentuan minimal 10%); 3) Akses dan mutu pendidikan dan yang semakin merata melalui penyediaan infrastruktur pendidikan dan infrastruktur kesehatan. Dukungan pemerintah kabupaten kota dan peran serta dunia usaha/masyarakat dalam rangka penyediaan RS Swasta di Banten; 4) Kemudahahan perijinan pendirian RS dan lembaga pendidikan dan pelatihan mandiri; 5) Daya beli masyarakat semakin meningkat. Strategi kedepan RS Daerah yang telah dibangun akan dilengkapi dengan fasilitas kesehatan memadai dan sumber daya kesehatan yang mumpuni menuju *health tourism*

Tabel 3.2
Target Komponen Indikator IPM Tahun 2023

No	Indikator IPM	Target Tahun 2023
1	Angka Harapan Hidup (AHH)	70,40 Tahun
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,75 Tahun
3	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,11 Tahun
4	Pengeluaran Perkapita	Rp. 12.168.000

Sumber:BPS Provinsi Banten

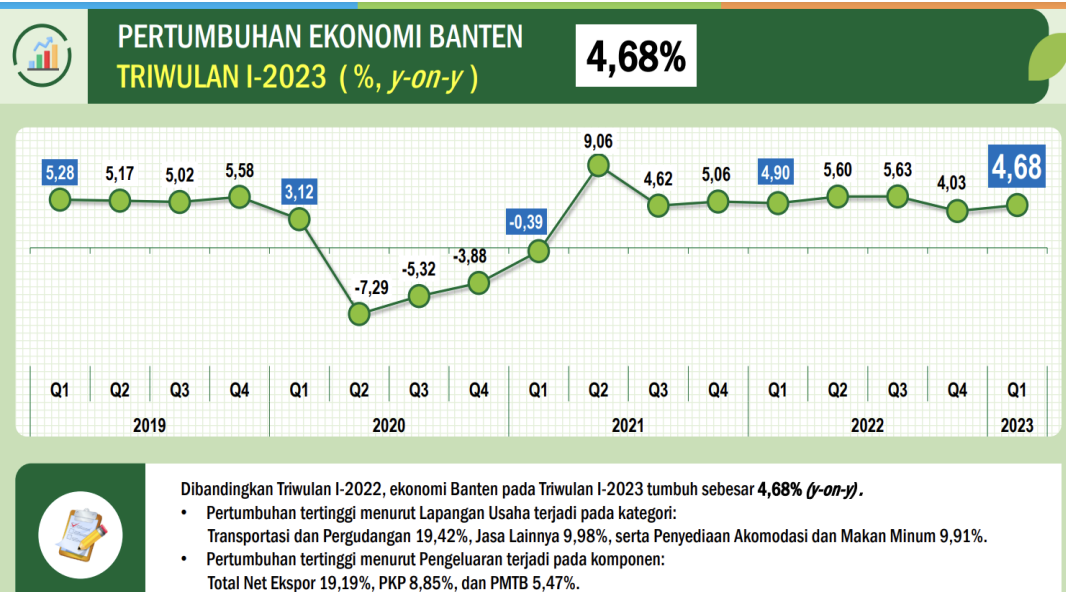
3.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kemajuan suatu daerah serta hasil dari pembangunan dilakukan selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat yang dilihat berdasarkan pendapatan per kapita atau pendapatan rata-rata dari penduduk sebuah daerah.

Pemerintah RI resmi mencabut kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) di seluruh wilayah Indonesia pada 30 Desember 2022. Pada triwulan I-2023, mobilitas penduduk dan aktivitas perekonomian sudah mendekati kondisi pra pandemi COVID-19. • Momen cuti bersama dan perayaan Tahun Baru Imlek dan Hari Suci Nyepi turut menopang beberapa aktivitas perekonomian, diantaranya pada sektor transportasi dan pariwisata. • Momen persiapan dan minggu pertama Bulan Ramadan di triwulan I-2023 turut mendorong konsumsi masyarakat. • Prompt Manufacturing Index Bank Indonesia (PMI-BI) secara nasional pada triwulan I-2023 mencapai 50,75%, lebih tinggi dibandingkan triwulan

sebelumnya dan masih berada pada fase ekspansi (indeks > 50%). Perkembangan PMI-BI tersebut sejalan dengan perkembangan kegiatan Lapangan Usaha Industri Pengolahan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia.

Gambar 3.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi TW 1 2023



Sumber:BPS Provinsi Banten

Secara kumulatif, ekonomi Banten triwulan I-2023 dibandingkan dengan triwulan I-2022 tumbuh sebesar 4,68% (c-to-c). Seluruh leading sector, yaitu Industri Pengolahan, Perdagangan, Konstruksi, Transportasi dan Pergudangan, Real Estat serta Pertanian melanjutkan tren positif sejak triwulan I-2022. Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi & Pergudangan serta Akomodasi & Makan Minum yang didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat serta peningkatan kunjungan wisatawan.

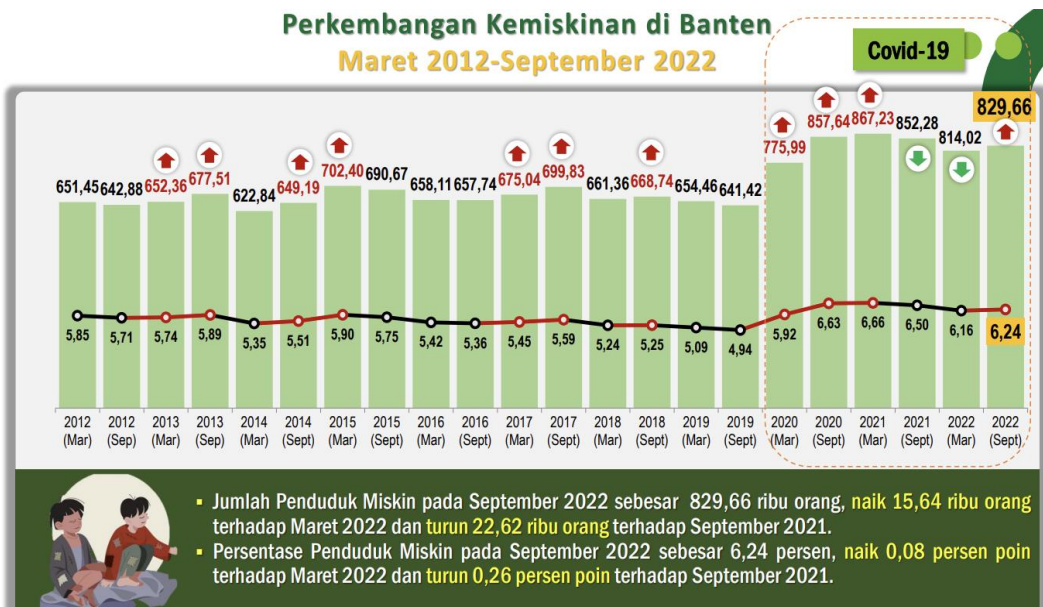
Beberapa lapangan usaha yang memiliki share besar terhadap perekonomian Banten pada triwulan I-2023 adalah sector industry sebesar 30,22%, Perdagangan besar 12,56% dan konstruksi 11,84%. Untuk sector yang mengalami pertumbuhan terbesar pada TW 1 adalah transportasi pergudangan 19,42% dan penyediaan akomodasi 9,91%. Pertumbuhan didorong terutama oleh kinerja positif Industri Makanan Minuman, Industri Logam Dasar; Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik; serta

Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik. Perdagangan tumbuh lebih cepat dengan ditopang oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor. Terjadi peningkatan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di pusat-pusat perbelanjaan pasca pandemi COVID-19 dan pencabutan kebijakan PPKM. Informasi Penjelaras Konstruksi tumbuh melambat, Pertumbuhan Konstruksi didukung oleh keberlanjutan proyek konstruksi pemerintah, seperti Jalan Tol Serang-Panimbang, pembangunan fasilitas pendidikan, serta pengembangan kawasan bisnis dan pemukiman.

3.1.3. Persentase Penduduk Miskin

Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Banten Nomor : No. 05/01/36/Th. XVII, 16 Januari 2023, Persentase penduduk miskin di Provinsi Banten pada September 2022 sebesar 6,24 persen, meningkat 0,08 persen poin terhadap Maret 2022.

Gambar 3.3 Perkembangan Kemiskinan Tahun 2012-2022



Sumber:BPS Provinsi Banten

Jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 829,66 ribu orang, meningkat 15,64 ribu orang terhadap Maret 2022 dan menurun 22,62 ribu orang terhadap September 2021. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2022 sebesar 5,73 persen, naik menjadi 5,89 persen pada September 2022. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan

pada Maret 2022 sebesar 7,46 persen, turun menjadi 7,29 persen pada September 2022. Dibanding Maret 2022, jumlah penduduk miskin September 2022 perkotaan naik sebanyak 19,72 ribu orang (dari 566,49 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 586,21 ribu orang pada September 2022). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan turun sebanyak 4,09 ribu orang (dari 247,54 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 243,45 ribu orang pada September 2022).

Garis Kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp598.748,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp433.368,- (72,38 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp165.380,- (27,62 persen). Pada September 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di Banten memiliki 4,42 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.646.466,-/rumah tangga miskin/bulan.

Provinsi banten dalam rangka penurunan kemiskinan telah melaksanakan berbagai program pembangunan secara terintergrasi dengan melibatkan berbagai urusan pemerintahan antara lain: 1).Pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas dalam rangka percepatan arus orang, mobilisasi barang, dan jasa semakin meningkat. 2).Pembangunan permukiman kumuh, rumah tidak layak huni. 3).Penanganan kemiskinan melalui bantuan sosial dan bantuan langsung tunai (BLT) masyarakat dalam rangka menjaga daya beli masyarakat.

Tabel 3.3
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, September 2021 – September 2022

No	Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin
1	Perkotaan		
	September 2021	576,62	6,04
	Maret 2022	566,49	5,73
	September 2022	586,21	5,89
2	Perdesaan		

	September 2021	275,66	7,72
	Maret 2022	247,54	7,46
	September 2022	243,45	7,29
Total			
	September 2021	852,28	6,50
	Maret 2022	814,02	6,16
	September 2022	829,66	6,24

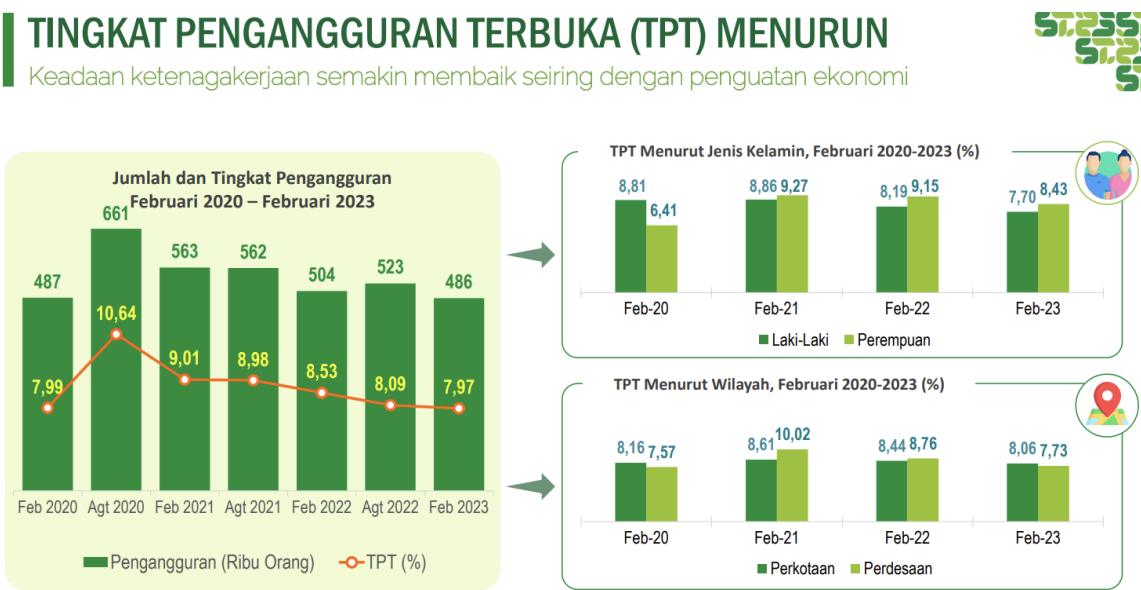
Sumber: BPS Provinsi Banten

3.1.4. **Tingkat Pengangguran**

Ketenagakerjaan mencerminkan kualitas sumber daya manusia dan pendapatan rumah tangga di Provinsi Banten. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja.

Membaiknya kondisi perekonomian mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 212 ribu orang, dan berkurangnya pengangguran sekitar 17,9 ribu orang, jumlah pengangguran pada Februari 2023 sebanyak 486,35 ribu orang atau 7,97%. Dimana TPT tertinggi pada tingkat pendidikan SMA dan TPT terendah pada tingkat pendidikan SD ke bawah. Keadaan ketenagakerjaan Provinsi Banten Februari 2023 memperlihatkan Jumlah angkatan kerja pada Februari 2023 sebanyak 6,1 juta orang, naik 194,1 ribu orang dibanding Februari 2022. Sementara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 0,86 persen poin menjadi 65,94%.

Gambar 3.4 Perkembangan Tingkat Pengangguran 2020-2023



Sumber:BPS Provinsi Banten

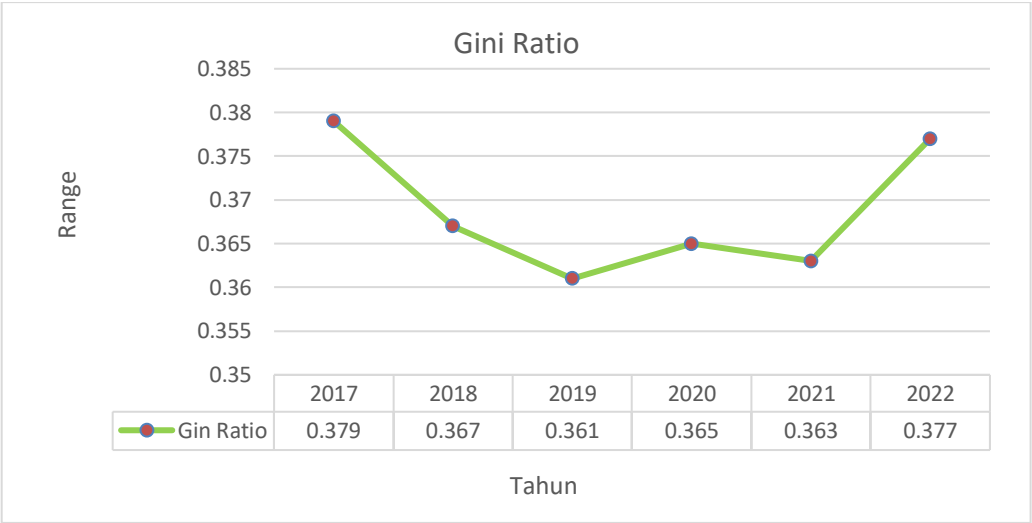
3.1.5. Indeks Gini

Salah satu ukuran untuk mengetahui sejauh mana pembangunan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat (*people prosperity*) digunakan indikator ketimpangan pengeluaran. Indeks Gini merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui pemerataan pengeluaran dan kesejahteraan antar individu dalam suatu wilayah tertentu (*income disparity*).

Berdasarkan data yang dirilis BPS Provinsi Banten bahwa Indeks Gini Provinsi Banten Periode September Tahun 2022 mencapai sebesar 0,377 poin yang berarti terdapat kenaikan sebesar 0,014 poin dibanding periode Maret 2022 yaitu 0,363 poin, perubahan angka pada satu tahun terakhir. Tercatat bahwa pengeluaran perkapita per bulan penduduk kelompok 20 persen berpengeluaran tinggi pada September 2022 mengalami peningkatan 1,49 poin persen, sementara pengeluaran per kapita per bulan penduduk kelompok 40 persen terbawah dan kelompok 40 persen berpengeluaran menengah menurun masing-masing sebesar 0,51 poin persen. Dengan adanya kenaikan pengeluaran berpengeluaran tinggi dan

penurunan pendapatan dari kelompok pengeluaran rendah maka ketimpangan penduduk periode September ini naik menjadi 0,377. Berdasarkan target perubahan RKPD perubahan dimana gini ratio ditargetkan 0,370 dan terealisasi 0,377 sehingga capaian kinerjanya sebesar 99,45%.

Gambar 3.5 Perkembangan Gini Ratio Tahun 2017-2022



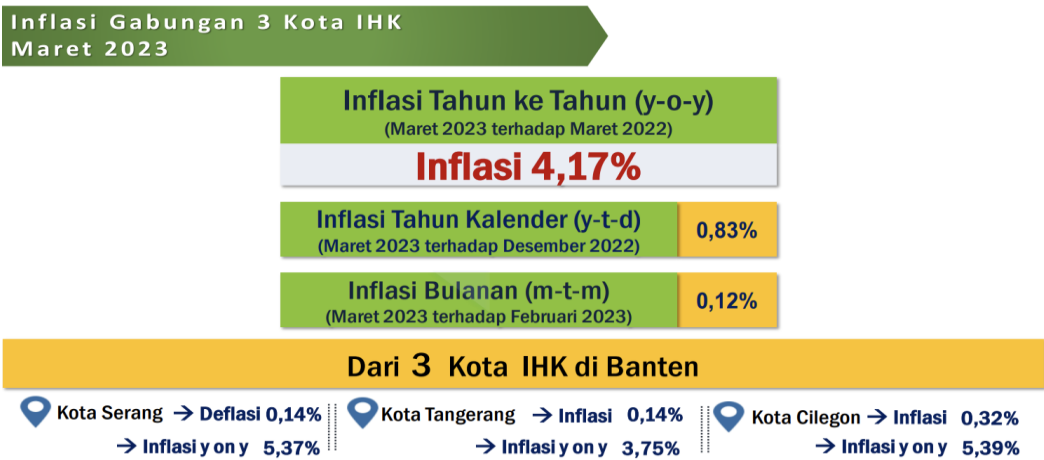
Sumber: BPS Provinsi Banten

3.1.6. Inflasi

Inflasi diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi harus terus dijaga agar tetap stabil karena kenaikan harga barang sehingga membuat daya beli masyarakat menurun, terutama masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Dampak inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin.

Inflasi pada bulan Maret 2023 tercatat 4,17% yang dihitung dari 3 Kota di ProvinsiBanten andil inflasi di Maret disebabkan pada komoditas Makanan, minuman dan tembakau dan transportasi.

Gambar 3.6 Perkembangan Inflasi Maret 2023



Sumber :BPS Provinsi Banten

3.2. Capaian Kinerja Utama Daerah Tahun 2023

Capaian Indikator Kinerja Utama daerah tahun 2023 terdiri atas 33 indikator berdasarkan dokumen RPD 2023-2026, adapun realisasi berdasarkan tabel dibawah dari 33 Indikator Pemerintah daerah yang telah tercapai sebanyak 17 indikator dan sebanyak 16 indikator berprogress mencapai target, dijelaskan rinci sebagai berikut:

Tabel.3.4
Realisasi Indikator Kinerja utama Daerah

No	Indikator utama Daerah	Target 2023	Realisasi S/d Tw I 2023	Ket
1.	Tingkat Kemiskinan	5,58	6,24	progres
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,67	7,97	Tercapai
3.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (satuan: nilai	73,27	73,32	Tercapai
4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,02-5,15	4,68	progres
5.	Indeks Williamson	0,622	0,620	progres
6.	Indeks Gini	0,354	0.377	progres
7.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	17	14,48	progres
8.	Indeks Reformasi Birokrasi	66	66,11	Tercapai
9.	Indeks Pembangunan Keluarga (satuan: nilai)	58,13	52,83	progres
10.	Indeks Desa Membangun (satuan: nilai)	0,665	0,644	progres

No	Indikator utama Daerah	Target 2023	Realisasi S/d Tw I 2023	Ket
11.	Proporsi penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan sosial (satuan: persen)	7,74	7,71	progres
12.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (satuan: persen)	65,19	65,94	Tercapai
13.	Rata-rata Lama Sekolah (satuan: tahun)	9,11	9,13	Tercapai
14.	Harapan Lama Sekolah (satuan: tahun)	13,75	15	Tercapai
15.	Angka Harapan Hidup (satuan: tahun)	70,40	70,96	Tercapai
16.	Prevalensi Stunting pada Balita (satuan: persen)	23,50	20	Tercapai
17.	Indeks Pembangunan Gender (satuan: nilai)	93,07	92,79	progres
18.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (satuan: nilai)	55,03	52,63	progres
19.	Indeks Pembangunan Pemuda dan Olahraga (satuan: nilai)	49,42	48,67	progres
20.	Pertumbuhan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB (satuan : persen)	3,97	5,47	Tercapai
21.	LPE sektor industri (Satuan: persen)	4,99	4,12	
22.	LPE Sektor Perdagangan (satuan: persen)	2,44	4,23	Tercapai
23.	LPE Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (satuan: persen)	4,39	4,34	
24.	LPE Sektor Pertanian dan Kelautan (satuan: persen)	0,68	3,38	Tercapai
25.	Indeks Daya Saing Infrastruktur (satuan: level)	Tinggi	Tinggi	Tercapai
26.	Pengeluaran Per Kapita Pertahun yang Disesuaikan (Satuan: Ribu Rupiah)	12.168	12.216	Tercapai
27.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (satuan: nilai)	62,99	63,52	Tercapai
28.	Indeks Risiko Bencana (satuan: nilai)	147,37	144,51	progres
29.	Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi (satuan: nilai)	69,77	67,20	progres
30.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (satuan: nilai)	82,20	55,89	progres
31.	Indeks Persepsi Anti-Korupsi (satuan: nilai)	2-3	2,5	tercapai
32.	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (satuan: nilai)	3,47	3,99	Tercapai
33.	Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Banten (satuan: level)	Cukup tangguh	Cukup tangguh	Tercapai

Sumber: Data BPS dan Olahan Bappeda

3.3. Rekapitulasi Capaian Kinerja Urusan Triwulan I Tahun 2023

Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 sebanyak 92 indikator yang menjadi Indikator urusan dan tersebar kinerjanya di berbagai Perangkat daerah, dari 92 indikator tersebut terdapat 13 indikator yang telah tercapai targetnya di 2023, sebanyak 26 indikator yang dalam progress pencapaian, dan 53 indikator baru akan terhitung di triwulan berikutnya atau di Triwulan IV, adapun rincian kinerja terdapat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Rekapitulasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah

	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023	REALISASI KINERJA S/D TW 1 2023	OPD
	2	3	4	5	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
	BIDANG PENDIDIKAN				
1	Cakupan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Persen	100	93,92	Progress
2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 16-18 Tahun	Persen	71,34	75,66	Tercapai
3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 4-18 Tahun penyandang disabilitas dalam Pendidikan Khusus	Persen	63,04		
4	Persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) Lulusan SMK	Persen	12,7	10,62	Tercapai
	BIDANG KESEHATAN				
5	Cakupan Layanan Intervensi Spesifik Dan Intervensi Sensitif Dalam Penurunan Stunting	Persen	40		
6	Persentase Capaian Rumah Sakit Pendidikan	Persen	76,92	46,15	Progres
7	Rasio Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	Kasus	81		
8	Rasio Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup)	Kasus	4,7		
9	Persentase Ketercapaian Indikator SPM Rumah Sakit	Persen	100		
	BIDANG KEBUDAYAAN				
10	Indeks kepuasan pengunjung museum daerah dan taman budaya dari total keseluruhan pengunjung museum dan taman budaya	Nilai	3,20		
11	Persentase Peningkatan Kualitas Pembangunan Kebudayaan	Persen	5		
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				

	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023	REALISASI KINERJA S/D TW 1 2023	OPD
	2	3	4	5	
12	Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	40		
13	Persentase Rumah Tangga yang Menghuni Rumah Layak dan Terjangkau	Persen	32,42		
14	Luas Permukiman Kumuh	Ha	277,63		
	BIDANG SOSIAL				
15	Persentase Penanganan Jumlah PMKS	Persen	5,40	6,98	Tercapai
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
16	Persentase Cakupan pembangunan gedung, bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Provinsi	Persen	100	100	Tercapai
17	Persentase Capaian Pelayanan Akses Air Minum regional, IPAL regional dan Pengelolaan Sampah Regional	Persen	19,76		
18	Persentase Kapasitas Tampung Sumber Daya Air	Persen	0,87		
19	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persen	100	96,90	Progres
20	Persentase Luas Layanan Irigasi	Persen	62,81		
21	Persentase Penanganan Pencegahan Banjir dan Abrasi	Persen	43,86	28,66	Progres
22	Tingkat Kemantapan Jalan dan Jembatan	Persen	94	94,25	Progres
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
23	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,55	0,54	Progres
24	Rasio Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran	Persen	100		
25	Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah	Persen	100		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
26	a. Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai	74,18	74,10	Progres
27	b. b. Indeks Kualitas Air (IKA)		54,44	55,90	Tercapai
28	c. c. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)		80,10		
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
29	Angka Kelahiran Tota TFR (<i>Total Fertility Rate</i>) WUS usia 15-49 tahun	Nilai	2,38	2,43	Progres
	BIDANG PENANAMAN MODAL				
30	Capaian realisasi penanaman modal (PMDN + PMA)	Triliyun Rupiah	60,00		
31	Indeks Kepuasan Pelayanan Perijinan	Nilai	86,22		
	BIDANG KEARSIPAN				
32	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan	Nilai	BB	BB	
	BIDANG PERSANDIAN				
33	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Nilai	273	583	Tercapai
	BIDANG PANGAN				
34	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	Nilai	70,73	73,78	Tercapai
	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				

	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023	REALISASI KINERJA S/D TW 1 2023	OPD
	2	3	4	5	
35	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	91,80	91,70	Progress
36	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	3,25	3,03	Progress
	BIDANG TENAGA KERJA				
37	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	Nilai	68,26		
	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
38	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Nilai	0,50	0,45	Progress
39	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Nilai	50	49	Progress
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
40	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	69,26	69,09	Progress
41	Indek Perlindungan Anak	Nilai	74,55		
	BIDANG PERPUSTAKAAN				
42	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	13	9,04	Progress
43	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	67,30	65,75	Progress
	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
44	Persentase Cakupan Database Kependudukan Tingkat Provinsi	Persen	100		
	BIDANG STATISTIK				
45	Persentase Ketersediaan Data Base Statistik Sektoral	Persen	100		
	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				
46	Persentase Koperasi yang Berkualitas	Persen	25		
47	Persentase Usaha Kecil yang Naik Kelas sesuai klaster	Persen	5		
	BIDANG PERHUBUNGAN				
48	Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 100 ribu Keberangkatan	Persen	19,70		
49	Rasio Konektivitas Provinsi	Persen	0,72		
50	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Nilai	82,00		
	BIDANG PERTANAHAN				
51	Persentase Pemenuhan Sub Urusan Pertanahan	Persen	100		
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
52	Persentase Penurunan Status Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	Persen	14,22	18,98	Progress
53	Persentas Desa Kategori Maju	Persen	13,49	12,86	progres
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
	BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				
54	Ketersediaan Pelayanan Informasi Aspek Kegeologian dan Sumber Daya Mineral	Persen	55,25	26,08	progres
55	Persentase pemanfaatan langsung energi baru terbarukan	Persen	5		
56	Rasio Elektrifikasi	Persen	98,2	99,99	Tercapai
	BIDANG KEHUTANAN				
57	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	35,10	39,06	Tercapai
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
58	NTN Sub Sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten	POIN	102		
59	Tingkat Produksi Sektor Perikanan	Ton	246.569		

	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023	REALISASI KINERJA S/D TW 1 2023	OPD
	2	3	4	5	
	BIDANG PARIWISATA				
60	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Asing)	Orang	20.060.922		
	BIDANG PERDAGANGAN				
61	Persentase Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	13,48	12,51	Progress
	BIDANG PERINDUSTRIAN				
62	Persentase Kontribusi PDRB sektor industri terhadap PDB sektor Industri	Persen	6,43	1,60	Progress
	BIDANG PERTANIAN				
63	Produksi Peternakan	Ton	225.907		
64	Produksi Hortikultura	Ton	23.714		
65	Produksi Tanaman Pangan	Ton	2.051.611		
66	Produksi Perkebunan	Ton	50.855		
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
	SEKRETARIAT DAERAH				
67	Indeks Kelembagaan	Nilai	41 - 60		
68	Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai	60		
69	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai	80,80	64,5	Progress
70	Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai	81,81	67,18	Progress
71	Nilai komponen pelaporan SAKIP Provinsi	Nilai	10,77	10,05	Progress
72	Persentase realisasi rumusan kebijakan Administrasi Pembangunan yang diimplementasikan	Persen	100		
73	Persentase realisasi rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian Daerah yang di implementasikan	Persen	100		
74	Persentase Realisasi Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	Persen	100		
75	Persentase realisasi pelayanan Pimpinan Daerah	Persen	100		
76	Persentase realisasi pelayanan SETDA	Persen	100		
77	Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Skor/ Nilai	4,24		
	SEKRETARIAT DPRD				
78	Tingkat Dukungan dan Fasilitasi DPRD	Persen	100		
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
	INSPEKTORAT DAERAH				
79	Jumlah Unit Kerja yang berpredikat ZI	Unit Kerja	1		
80	Maturitas SPIP	Nilai	3,14	3,04	
81	Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi Internal	Nilai	14	15,30	Tercapai
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
	KEUANGAN				
82	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	Tercapai
83	Kemandirian Keuangan	Persen	63,55		
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				

	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023	REALISASI KINERJA S/D TW 1 2023	OPD
	2	3	4	5	
84	Indeks Inovasi Daerah	Level	Sangat Inovatif (60.01)	Inovatif (50,41)	progres
	KEPEGAWAIAN				
85	Indeks Merit Sistem	Nilai	321,5	321,5	Tercapai
86	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	24,48	31,29	Tercapai
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
87	Indeks Profesional Aparatur Dimensi Kompetensi ASN	Persen	10,23		
	PERENCANAAN				
88	Nilai SAKIP pada Komponen Perencanaan dan Pengukuran	Kategori/ Nilai	45	41,85	Progress
	PENGHUBUNG				
89	Capaian Pelayanan Penghubung	Indeks	4		
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
90	Indeks Demokrasi Indonesia Banten	Nilai	77,55	75,93	Progress
91	Persentase konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan HAM yang ditangani	Persen	100	100	
	NON URUSAN				
92	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	70-80		

Sumber: Data olahan Bappeda 2023

3.4. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar melaksanakan 6 Urusan Bidang, 36 program dan 111 kegiatan yang tersebar di 8 Perangkat Daerah, yaitu: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Kesehatan; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Satuan Polisi Pamong Praja; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan Dinas Sosial Provinsi Banten.

Adapun Bidang Urusan yang ada pada Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2023, sebagai berikut :

3.4.1. Bidang Pendidikan

Pada Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan didukung oleh 5 program, 14 kegiatan dan 143 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

3.4.2. Bidang Kesehatan

Pada Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan didukung oleh 5 program, 19 kegiatan dan 87 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

3.4.3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pada Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang didukung oleh 11 program, 24 kegiatan dan 103 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

3.4.4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.

Pada Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman didukung oleh 5 program, 16 kegiatan dan 71 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten.

3.4.5. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Pada Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat didukung oleh 4 program, 17 kegiatan dan 94 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Satuan Polisi Pamong Praja, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten.

3.4.6. Bidang Sosial.

Pada Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Sosial didukung oleh 6 program, 19

kegiatan dan 96 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Sosial Provinsi Banten.

3.5. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar melaksanakan 18 Urusan Bidang, 77 program, 205 kegiatan dan 768 sub kegiatan yang tersebar di 11 Perangkat Daerah, yaitu : Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perhubungan, dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten.

Adapun Bidang Urusan yang ada pada Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2022, sebagai berikut :

3.5.1. Bidang Ketenagakerjaan

Pada Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Ketenaga Kerjaan didukung oleh 6 program, 20 kegiatan dan 71 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Banten.

3.5.2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pada Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didukung oleh 7 program, 23 kegiatan dan 87 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten.

3.5.3. Bidang Pangan

Pada Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Pangan didukung oleh 4 program, 13 kegiatan dan 41 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten.

3.5.4. Bidang Lingkungan Hidup

Pada Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup didukung oleh 5 program, 14 kegiatan dan 53 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.

3.5.5. Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil

Pada Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil didukung oleh 4 program, 9 kegiatan dan 28 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten.

3.5.6. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pada Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa didukung oleh 5 program, 12 kegiatan dan 63 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten.

3.5.7. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pada Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana didukung oleh 3 program, 6 kegiatan dan 25 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten.

3.5.8. Bidang Perhubungan.

Pada Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan didukung oleh 4 program, 16 kegiatan dan 44 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten.

3.5.9. Bidang Komunikasi dan Informatika.

Pada Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika didukung oleh 3 program, 11 kegiatan dan 65 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten.

3.5.10. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Pada Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah didukung oleh 6 program, 14 kegiatan dan 58 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten.

3.5.11. Bidang Penanaman Modal

Pada Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal didukung oleh 6 program, 14 kegiatan dan 51 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten.

3.5.12. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Pada Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga didukung oleh 4 program, 14 kegiatan dan 59 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Banten.

3.5.13. Bidang Statistik

Pada Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Statistik didukung oleh 1 program, 1 kegiatan dan 6 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian.

3.5.14. Bidang Persandian

Pada Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Persandian didukung oleh 1 program, 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten.

3.5.15. Bidang Kebudayaan

Pada Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan didukung oleh 4 program, 11 kegiatan dan 28 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

3.5.16. Bidang Perpustakaan.

Pada Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan didukung oleh 2 program, 9 kegiatan dan 41 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Banten.

3.5.17. Bidang Kearsipan.

Pada Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan didukung oleh 2 program, 5 kegiatan dan 10 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Banten.

3.6. Penyelenggaraan Urusan Pilihan

Penyelenggaraan Urusan Pilihan melaksanakan 7 Urusan Bidang, 37 program, 115 kegiatan dan 421 sub kegiatan yang tersebar di 5 (lima) Perangkat Daerah, yaitu: Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata,

Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Adapun Bidang Urusan yang ada pada Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2021, sebagai berikut :

3.6.1. Bidang Kelautan dan Perikanan.

Pada Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan didukung oleh 6 program, 25 kegiatan dan 86 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten.

3.6.2. Bidang Pariwisata.

Pada Urusan Pilihan Bidang Pariwisata didukung oleh 5 program, 16 sub kegiatan dan 61 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten.

3.6.3. Bidang Pertanian.

Pada Urusan Pilihan Bidang Pertanian didukung oleh 7 program 24 kegiatan dan 73 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pertanian Provinsi Banten.

3.6.4. Bidang Kehutanan.

Pada Urusan Pilihan Bidang Kehutanan didukung oleh 4 program 11 kegiatan dan 50 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.

3.6.5. Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral.

Pada Urusan Pilihan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral didukung oleh 5 program, 16 kegiatan dan 63 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten.

3.6.6. Bidang Perdagangan.

Pada Urusan Pilihan Bidang Perdagangan didukung oleh 6 program, 13 kegiatan dan 34 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten.

3.6.7. Bidang Perindustrian.

Pada Urusan Pilihan Bidang Perindustrian didukung oleh 4 program, 10 kegiatan dan 54 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten.

3.7. Penyelenggaraan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Penyelenggaraan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan melaksanakan 2 Urusan Bidang, 10 program, 47 kegiatan dan 192 sub kegiatan yang tersebar di 2 Perangkat Daerah, yaitu: Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Banten.

Adapun Bidang Urusan yang ada pada Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2022, sebagai berikut :

3.7.1. Bidang Sekretariat Daerah

Pada Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah didukung oleh 8 program, 30 kegiatan dan 116 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Sekretariat Daerah Provinsi Banten (Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Biro Hukum, Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi, Biro Umum, Biro Pengadaan Barang/Jasa, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Biro Administrasi Pimpinan).

3.7.2. Bidang Sekretariat DPRD

Pada Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat DPRD didukung oleh 2 program, 17 kegiatan dan 76 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Sekretariat DPRD Provinsi Banten.

3.8. Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan melaksanakan 6 Urusan Bidang, 14 program, 64 kegiatan dan 386 sub kegiatan yang tersebar di 7 Perangkat Daerah, yaitu: Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Badan Penghubung Provinsi Banten.

Adapun Bidang Urusan yang ada pada Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2023, sebagai berikut :

3.8.1. Bidang Perencanaan

Pada Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan didukung oleh 3 program, 15 kegiatan dan 86 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.

3.8.2. Bidang Keuangan

Pada Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan didukung oleh 4 program, 16 kegiatan dan 126 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten.

3.8.3. Bidang Kepegawaian

Pada Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian didukung oleh 2 program, 12 kegiatan dan 89 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten.

3.8.4. Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Pada Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan didukung oleh 2 program, 10 kegiatan dan 38 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Banten.

3.8.5. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pada Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan didukung oleh 1 program, 4 kegiatan

dan 15 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.

3.8.6. Bidang Pengelolaan Penghubung

Pada Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengelolaan Penghubung didukung oleh 2 program, 7 kegiatan dan 32 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten.

3.9. Penyelenggaraan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Penyelenggaraan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan melaksanakan 1 Urusan Bidang, 3 program, 11 kegiatan dan 37 sub kegiatan yang tersebar di pada 1 Perangkat Daerah, yaitu: Inspektorat Provinsi Banten.

3.10. Penyelenggaraan Unsur Pemerintahan Umum

Penyelenggaraan Unsur Pemerintahan Umum melaksanakan 1 Urusan Bidang, 6 program, 12 kegiatan dan 64 sub kegiatan yang tersebar pada 1 Perangkat Daerah, yaitu: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.

3.11. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Berdasarkan Program Tahun 2023

Adapun capaian pelaksanaan kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Urusan dan Organisasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten Triwulan I Tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel 3.2
Realisasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan I-2023

BIDANG URUSAN	KODE_P	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	
				RP	(%)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.317.617.820.859	169.729.438.564	12,88
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.689.309.853.572	110.277.557.103	6,53
	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	3.800.000.000	-	-
	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	109.520.000.000	-	-
	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	200.000.000	-	-
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Total			3.120.447.674.431	280.006.995.667	8,97
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	531.302.032.604	43.365.151.872	8,16
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	543.026.669.853	69.645.622.846	12,83
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	77.138.856.700	4.118.633.050	5,34
	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	835.940.000	91.335.500	10,93
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.117.082.500	412.345.600	13,23
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Total			1.155.420.581.657	117.633.088.868	10,18
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	127.741.779.660	15.526.234.946	
	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	128.756.359.291	2.891.983.200	
	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	46.070.000.000	151.509.200	
	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	2.830.000.000	-	
	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	450.000.000	-	

BIDANG URUSAN	KODE_P	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	
				RP	(%)
	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	63.750.000.000	1.792.348.077	
	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	124.880.150.000	1.942.053.174	
	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	597.473.169.449	5.516.897.350	
	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	5.435.407.600	-	
	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	3.750.000.000	-	
	1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	4.500.000.000	-	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Total			1.105.636.866.000	27.821.025.947	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	38.387.050.000	3.210.726.403	
	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	21.500.000.000	-	
	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	80.798.000.000	-	
	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	379.526.950.000	-	
	1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	500.000.000	-	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Total			520.712.000.000	3.210.726.403	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	59.199.260.000	6.115.532.131	
	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.752.396.000	161.262.000	
	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	17.463.344.000	243.650.000	
	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	7.775.000.000	-	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Total			92.190.000.000	6.520.444.131	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	46.815.389.700	2.532.743.560	
	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.949.750.000	-	

BIDANG URUSAN	KODE_P	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	
				RP	(%)
	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	9.433.194.000	83.550.000	
	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	53.054.802.500	-	
	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.199.863.800	-	
	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	75.000.000	-	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Total			112.528.000.000	2.616.293.560	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	64.292.623.700	5.220.151.189	
	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	14.996.136.300	7.800.000	
	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	3.400.000.000	38.880.000	
	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	3.567.060.000	188.186.000	
	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	1.149.341.000	-	
	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	92.839.000	-	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Total			87.498.000.000	5.455.017.189	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.545.590.000	3.685.746.267	
	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	7.548.424.000	977.165.000	
	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.317.188.000	129.506.460	
	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2.494.955.000	64.350.000	
	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	200.000.000	19.950.000	
	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	880.000.000	41.100.000	
	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1.251.728.000	88.710.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Total			36.237.885.000	5.006.527.727	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.099.420.700	2.915.413.071	

BIDANG URUSAN	KODE_P	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	
				RP	(%)
	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	24.292.579.300	104.175.000	
	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	1.700.000.000	-	
	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	977.000.000	52.093.800	
	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	1.320.000.000	-	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Total			50.389.000.000	3.071.681.871	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	100.000.000	-	
	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	200.000.000	-	
	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	200.000.000	-	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Total			500.000.000	-	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	52.068.584.800	4.486.419.242	
	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN / ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.901.057.000	34.754.000	
	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	551.000.000	26.832.000	
	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	916.000.000	24.830.000	
	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	735.000.000	44.400.000	
	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	7.819.445.000	111.002.900	
	2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	774.500.000	20.180.000	
	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	128.419.200	9.460.000	
	2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	384.546.000	-	
	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	744.000.000	-	

BIDANG URUSAN	KODE_P	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	
				RP	(%)
	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	468.000.000	17.400.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Total			66.490.552.000	4.775.278.142	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	850.000.000	41.884.220	
	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	750.000.000	59.164.480	
	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	560.000.000	-	
	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	104.915.000	-	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Total			2.264.915.000	101.048.700	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.039.072.000	2.314.430.508	
	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	500.000.000	51.699.000	
	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	1.535.000.000	-	
	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	11.630.888.000	2.151.338.000	
	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.424.040.000	489.417.500	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Total			32.129.000.000	5.006.885.008	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	565.000.000	17.745.900	
	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.124.000.000	56.228.974	
	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	5.194.400.000	154.400.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Total			6.883.400.000	228.374.874	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	38.355.695.000	3.950.850.146	
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	31.749.305.000	210.968.695	
	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1.580.000.000	-	

BIDANG URUSAN	KODE_P	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	
				RP	(%)
	2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	1.050.000.000	-	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Total			72.735.000.000	4.161.818.841	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.803.650.511	1.542.591.382	
	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	12.686.573.000	472.514.500	
	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	28.509.955.389	221.112.900	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Total			65.000.178.900	2.236.218.782	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.034.355.900	1.675.802.657	
	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	3.499.874.000	3.300.000	
	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1.310.474.100	-	
	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.073.763.000	-	
	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	584.160.000	-	
	2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.892.154.000	12.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Total			27.394.781.000	1.691.102.657	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.477.000.000	2.251.449.499	
	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	5.920.000.000	7.165.000	
	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	4.778.244.000	29.740.500	
	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.250.000.000	11.997.000	
	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1.774.600.000	27.816.000	
	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	350.000.000	9.511.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Total			35.549.844.000	2.337.678.999	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.201.852.150	2.904.714.425	

BIDANG URUSAN	KODE_P	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	
				RP	(%)
	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	5.200.000.000	67.200.000	
	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	61.024.245.600	1.007.736.000	
	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1.581.902.250	-	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Total			89.008.000.000	3.979.650.425	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	1.055.542.600	-	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Total			1.055.542.600	-	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.750.278.500	24.996.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN Total			2.750.278.500	24.996.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	4.100.000.000	-	
	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	1.280.000.000	-	
	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	420.000.000	-	
	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1.650.000.000	-	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Total			7.450.000.000	-	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.880.572.700	1.849.491.565	
	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	3.881.664.300	73.761.500	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Total			25.762.237.000	1.923.253.065	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.233.915.000	11.586.270	
	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	999.848.000	-	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Total			3.233.763.000	11.586.270	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	60.351.971.900	3.270.043.830	
	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	1.995.000.000	-	

BIDANG URUSAN	KODE_P	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	
				RP	(%)
	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	35.565.006.200	-	
	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	8.937.286.000	-	
	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	700.000.000	-	
	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.613.405.900	-	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Total			109.162.670.000	3.270.043.830	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.580.290.000	1.584.468.031	
	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	18.615.355.000	-	
	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	5.295.355.000	-	
	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	2.300.000.000	-	
	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.850.000.000	-	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Total			49.641.000.000	1.584.468.031	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	66.635.086.500	6.083.859.200	
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	32.295.008.900	271.798.956	
	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	8.073.562.600	54.158.900	
	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.373.542.000	119.030.000	
	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1.100.000.000	-	
	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	250.000.000	-	
	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	7.367.800.000	55.660.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Total			119.095.000.000	6.584.507.056	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	6.510.470.000	14.365.000	

BIDANG URUSAN	KODE_P	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	
				RP	(%)
	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	2.996.540.000	6.302.500	
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	703.650.000	12.466.000	
	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	958.788.000	6.056.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Total			11.169.448.000	39.189.500	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.332.519.000	3.701.383.586	
	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN	2.340.000.000	8.770.000	
	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	579.237.000	26.624.000	
	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	17.299.549.000	273.437.580	
	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	606.695.000	8.421.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Total			44.158.000.000	4.018.636.166	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	950.000.000	-	
	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	2.200.000.000	-	
	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	1.100.000.000	-	
	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3.848.315.600	-	
	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	710.000.000	-	
	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	460.000.000	-	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Total			9.268.315.600	-	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	73.862.291.400	2.472.569.541	
	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	6.260.393.000	-	
	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	300.000.000	-	
	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	600.000.000	-	

BIDANG URUSAN	KODE_P	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	
				RP	(%)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Total			81.022.684.400	2.472.569.541	
SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	226.736.795.264	24.261.627.673	
	4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	2.819.183.000	-	
	4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	3.350.000.000	-	
	4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	19.480.000.000	-	
	4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	3.265.727.200	-	
	4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.191.070.251	53.644.125	
	4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1.950.224.285	-	
	4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.000.000.000	-	
SEKRETARIAT DAERAH Total			259.793.000.000	24.315.271.798	
SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	240.127.225.000	35.312.012.453	
	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	248.784.775.000	33.037.252.384	
SEKRETARIAT DPRD Total			488.912.000.000	68.349.264.837	
PERENCANAAN	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	40.079.483.800	6.630.636.095	
	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	8.399.999.900	475.791.110	
	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.431.516.300	101.426.845	
PERENCANAAN Total			50.911.000.000	7.207.854.050	
KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	326.998.678.022	41.420.741.601	
	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	3.156.650.622.973	534.334.321.473	
	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	11.094.129.000	310.735.300	
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	23.068.622.652	-	

BIDANG URUSAN	KODE_P	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	
				RP	(%)
KEUANGAN Total			3.517.812.052.647	576.065.798.374	
KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	55.837.392.200	3.778.002.120	
	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	9.746.607.800	650.150.500	
KEPEGAWAIAN Total			65.584.000.000	4.428.152.620	
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	34.139.080.600	5.314.127.102	
	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	19.842.919.400	911.498.949	
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Total			53.982.000.000	6.225.626.051	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.550.000.000	6.984.000	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Total			3.550.000.000	6.984.000	
PENGELOLAAN PENGHUBUNG	5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.670.608.170	689.764.278	
	5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	3.583.391.830	-	
PENGELOLAAN PENGHUBUNG Total			13.254.000.000	689.764.278	
INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	62.868.778.000	7.493.852.648	
	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	7.789.982.000	97.204.250	
	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	984.240.000	-	
INSPEKTORAT DAERAH Total			71.643.000.000	7.591.056.898	
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.935.547.817	2.006.056.669	
	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	6.212.583.055	60.000.000	
	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	38.172.070.000	10.761.300	
	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1.560.000.000	70.217.000	

BIDANG URUSAN	KODE_P	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	
				RP	(%)
	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	2.923.996.300	200.000.000	
	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	35.621.423.828	5.990.000.000	
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Total			106.425.621.000	8.337.034.969	

BAB IV

ANALISIS, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

4.1. Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Triwulan I 2023

Berdasarkan pada bab III indikator kinerja daerah menunjukkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Utama daerah tahun 2023 terdiri atas 33 indikator berdasarkan dokumen RPD 2023-2026, adapun realisasi Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten yang telah tercapai sebanyak 17 indikator dan sebanyak 16 indikator berprogress untuk mencapai target di akhir tahun.

Beberapa hal yang bisa di analisis dari proses pencapaian target di tahun 2023 ini, sasaran daerah yang perlu penguatan adalah capaian makro daerah dan capaian yang berhubungan dengan pencapaian misi Tata Kelola Pemerintahan. Hal ini perlu dikuatkan dengan komitmen pimpinan dan fokus pada indikator yang progress pencapaiannya masih belum mendekati target 2023.

4.2. Analisis Kinerja Perangkat Daerah

A. Realisasi Kinerja Perangkat Daerah

Realisasi kinerja yang tersedia di Bab III, menunjukkan bahwa dari total Kinerja Urusan atau Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2023 sebanyak 92 indikator yang tersebar kinerjanya di berbagai Perangkat Daerah, dari 92 indikator tersebut terdapat 13 indikator yang telah tercapai targetnya di 2023, sebanyak 26 indikator yang dalam progress pencapaian, dan 53 indikator baru akan terhitung di triwulan berikutnya atau di Triwulan IV. Adapun hal-hal yang perlu di perkuat dalam rangka mencapai target kinerja 2023 adalah belanja yang mendukung prioritas dan target PD perlu dikuatkan dan di lakukan inovasi sehingga capaian kinerjanya bisa mencapai target.

PD berfokus pada penghitungan kinerja sesuai dengan penghitungan DO (Definisi Operasional). Komitmen pimpinan juga perlu diperkuat dalam rangka pengendalian kinerja PD dan memperkuat strategi serta rencana aksi kinerja untuk mencapai target kinerja pada 2023.

B. Berdasarkan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah

Realisasi kinerja Perangkat Daerah pada Triwulan I tahun 2023 berdasarkan capaian keuangan, Pada APBD 2023 Provinsi Banten Belanja APBD sebesar Rp.11.774.651.290.753,- dan terealisasi sebesar Rp.1.199.005.915.125,- atau 10,18% , dapat disimpulkan sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Rekapitulasi Realisasi Keuangan Perangkat Daerah

Katagori Penilaian Berdasarkan Persentase Realisasi Keuangan	Perangkat Daerah
Perangkat Daerah dengan capaian (≥20)	
Perangkat Daerah dengan capaian (10≥20)	1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3. Sekretariat DPRD 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5. Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Katagori Penilaian Berdasarkan Persentase Realisasi Keuangan	Perangkat Daerah
	Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana 6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 7. Badan Pendapatan Daerah 8. Inspektorat 9. Dinas Kesehatan
Perangkat Daerah dengan capaian (5≥10)	1. Sekretariat Daerah 2. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 3. Satuan Polisi Pamong Praja 4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 6. Badan Kepegawaian Daerah 7. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 9. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 10. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 12. Dinas Ketahanan Pangan 13. Dinas Perhubungan 14. Dinas Pertanian 15. Badan Penghubung
Perangkat Daerah dengan capaian	1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2. Dinas Kepemudaan dan Olahragadinas

Katagori Penilaian Berdasarkan Persentase Realisasi Keuangan	Perangkat Daerah
(≤5)	Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. 3. Dinas Pariwisata 4. Dinas Kelautan dan Perikanan 5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 7. Dinas Sosial 8. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sumber: BPKAD 2023

Tabel 4.1 menunjukkan realisasi keuangan dimana dengan capaian (10≥20) sebanyak 9 Perangkat Daerah, dengan capaian (5≥10) sebanyak 15 Perangkat Daerah dan yang berada pada capaian dibawah (≤5) ada 8 Perangkat Daerah.

4.3. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Dalam Pelaksanaan RKPD tahun 2023 pada triwulan I secara umum belum dijumpai adanya kendala yang berarti. Sebagian besar anggaran Program Kegiatan belum dapat direalisasikan karena memang masih dalam fase persiapan pelaksanaan kegiatan. Perangkat daerah selaku pelaksana Program Kegiatan mengupayakan agar pencapaian target kinerja dapat dipenuhi secara berkualitas dan tepat waktu.

Dukungan dan kerjasama stake holder menjadi kunci keberhasilan dalam pencapaian target kinerja Program dan Kegiatan. Sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan Program Pembangunan di Provinsi Banten, diharapkan perlu adanya peningkatan penyelarasan dan antisipasi kebijakan pada tahap perencanaan dan pengendalian antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga dapat meminimalisir permasalahan keterlambatan pelaksanaan kegiatan.

BAB V

PENUTUP

Pemerintah Provinsi Banten telah melaksanakan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Triwulan I Tahun 2023 yang merupakan komitmen dalam mengawal pencapaian Target Tujuan dan Sasaran Tahun 2023-2026 guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pengukuran capaian indikator kinerja Tujuan, Sasaran Daerah, Sasaran PD, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten dan Perangkat Daerah berdasarkan Urusan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Banten, diharapkan menjadi input dalam pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi atas kinerja yang hasilnya untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan periode selanjutnya.

Dalam Pelaksanaan RKPD tahun 2023 pada triwulan I secara umum belum dijumpai adanya kendala yang berarti. Sebagian besar anggaran Program Kegiatan belum dapat direalisasikan karena memang masih dalam fase persiapan pelaksanaan kegiatan. Perangkat daerah selaku pelaksana Program Kegiatan mengupayakan agar pencapaian target kinerja dapat dipenuhi secara berkualitas dan tepat waktu.

Dukungan dan kerjasama stake holder menjadi kunci keberhasilan dalam pencapaian target kinerja Program dan Kegiatan. Sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan Program Pembangunan di Provinsi Banten, diharapkan perlu adanya peningkatan penyesuaian dan antisipasi kebijakan pada tahap perencanaan dan pengendalian antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga dapat meminimalisir permasalahan keterlambatan pelaksanaan kegiatan.

Demikian Laporan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 disusun, diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai masukan dan perbaikan dalam pelaksanaan program pembangunan triwulan selanjutnya.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2023